



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ENY FAUZIAH
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 242673

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.460.000.000**

1. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN
Rp. 360.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1400 m2/144 m2 di KAB / KOTA
KARANGANYAR, WARISAN Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 3600 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR,
WARISAN Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 151.500.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1996, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL
SENDIRI Rp. 8.500.000
5. MOBIL, TOYOTA AGYA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 31.850.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 108.934.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp. ---**



Sub Total	Rp.	1.752.284.000
III. HUTANG	Rp.	66.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.685.884.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.